



Kebijakan Moneter Di Indonesia

Maulidatul Hasanah¹, Rini Puji Astuti², Intan Ambarwati³, Maryani⁴

^{1,2,3,4}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹maulidahsnh393@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 25 April 2024</p> <p>Diterima: 29 April 2024</p> <p>Diterbitkan: 06 Mei 2024</p> <p>Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Krisis, Inflasi, Stabilitas Harga, Nilai Tukar</p>	<p>Kebijakan moneter merupakan salah satu komponen penting dalam sistem ekonomi yang kondisinya selalu tidak pasti. Sebelum krisis moneter Asia pada tahun 1997, Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang cenderung longgar. Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada menjaga stabilitas harga. Saat krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Bank Indonesia terpaksa mengubah kebijakan moneternya secara drastis untuk mengatasi gejolak ekonomi yang terjadi. Upaya stabilisasi mata uang rupiah dilakukan melalui intervensi pasar valuta asing dan peningkatan suku bunga acuan secara signifikan. Setelah krisis 1997, Indonesia melakukan reformasi sistem keuangan dan moneter untuk memperbaiki ketahanan ekonominya. Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan inflasi targeting dengan fokus utama pada stabilitas harga. Kebijakan kuantitatif juga pernah digunakan di Indonesia dalam kebijakan moneter. Untuk menstabilkan pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas sistem perbankan. Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi adalah tujuan dari kebijakan ini. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bank Indonesia dapat intervensi di pasar valuta asing jika diperlukan. Cadangan devisa yang besar juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan negara terhadap ancaman internasional. Sejak krisis moneter 1997, kebijakan moneter Indonesia telah mengalami perubahan besar. Fokus dari pertumbuhan ekonomi menuju stabilitas harga dan peningkatan ketahanan ekonomi melalui instrumen kebijakan kuantitatif dan pengaturan nilai tukar dan devisa.</p>

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter (Warjiyo & Solikin, 2003).

Undang-undang (UU) Bank Indonesia No.23 tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2004 pada pasal 7 menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia (BI) adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan *single objective* Bank Indonesia. Pada UU tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan nilai rupiah. Kebijakan moneter dengan tujuan stabilisasi nilai rupiah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2000, namun secara formal diterapkan mulai juli tahun 2005. Tujuan tunggal kebijakan moneter BI tersebut terangkum dalam kerangka kerja penargetan inflasi (M Yusuf, 2016).

Secara umum inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung seberapa parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan dirasakan lesu. Untuk menghindari dampak naik turunnya inflasi perlu adanya pengendalian inflasi. Dalam hal ini bank sentral memiliki peranan dalam mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak luar bank sentral, termasuk pemerintah (Utami dan Soebagyo, 2013).

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan (Eka, 2014). Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI rate) yang diharapkan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi (Eka, 2014).

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus di capai oleh Bank Indonesia. Berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang sasaran inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2013-2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5% dan 4% masing-masing dengan deviasi $\pm 1\%$ (Sudarmono, 2017). selama pandemi covid-19 yaitu tahun 2020 sampai tahun 2022 awal angka inflasi tetap rendah. Terbatasnya aktivitas masyarakat menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun. Hal ini juga menyebabkan uang beredar menurun sehingga inflasi berada di tingkat yang rendah. Pada periode selanjutnya angka inflasi terus meningkat seiring meredanya pandemi covid-19. Pada Desember 2022 terjadi inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,86 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,87 persen; kelompok transportasi sebesar 15,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen (Insani dkk, 2023).

METODE

Tahapan Penelitian

Metode pada jurnal ini menggunakan studi pustaka (*library reseach*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan alat perlengkapan, menyusun bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu, membaca dan membuat catatan penelitian (Zed, 2004). Proses pengumpulan data ini menggunakan metode mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi ini harus dianalisis secara menyeluruh agar dapat mendukung gagasan dan proposisinya.

Sub Title 2

Sub Title 2 ini bisa juga berisi metode penyelesaian masalah, serta tahapan tahapan dari metode tersebut. Dalam naskah, nomor kutipan secara berurutan dalam tanda kurung siku [3], juga tabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Periode Sebelum, saat dan Sesudah krisis 1997

Akhir tahun 1997, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi sehingga menjadi awal terjadinya krisis moneter.

Beberapa penyebab krisis Indonesia pada tahun 1998. Pertama, stok utang luar negeri swasta yang sangat besar dan berjangka pendek yang menyebabkan kondisi ketidakstabilan ekonomi dan cenderung mengabaikan nasihat dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri dalam menghadapi besarnya persayaratan utang swasta. Utang sektor swasta menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah Indonesia. Pada tahun 1992-1997, 85% penambahan utang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta. Kedua, buruknya sistem perbankan di Indonesia. Utang luar negeri swasta yang sangat besar menyebabkan beralihnya tanggung jawab utang luar negeri swasta, kemudian menjadi masalah yang ditanggung oleh perbankan negeri. Banyaknya perbankan Indonesia yang melanggar ketentuan dikarenakan minimnya penegakan hukum dan pengawasan pemerintah. Selain itu, modal bank yang kurang mencukupi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis moneter.

Krisis ekonomi dan moneter menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara miskin yang ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita. Krisis moneter pada tahun 1998 pendapatan perkapita Indonesia sebesar USD 459,191863.

Tabel 1 GDP Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter Periode 1978-2018 Dalam USD

Tahun	Sebelum Krisis Moneter Periode 1978 -1997	Tahun	Sesudah Krisis Moneter Periode 1999 -2018
1978	364,2857906	1999	663,5232299
1979	355,2359511	2000	770,8653516
1980	489,1601963	2001	739,0039465
1981	563,7833647	2002	888,9013897
1982	580,8105956	2003	1052,413199
1983	510,4349866	2004	1136,755211
1984	522,7171467	2005	1249,397694
1985	514,4376435	2006	1572,79794
1986	472,7226388	2007	1840,329927
1987	440,3723783	2008	2144,389544
1988	479,8107166	2009	2239,095265
1989	527,8114773	2010	3094,443079
1990	582,6789678	2011	3613,800888
1991	629,1606798	2012	3668,212084
1992	678,977737	2013	3602,885517
1993	824,079149	2014	3476,624854
1994	907,4717857	2015	3322,581679
1995	1020,146681	2016	3558,818852
1996	1129,09271	2017	3839,785075
1997	1054,347358	2018	3902,661675

Sumber: *World Bank*

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya krisis moneter, GDP perkapita Indonesia mengalami pertumbuhan seperti pada tahun 1980 sebesar 489,1601963 ke tahun 1981 sebesar 563,7833647 yang mengalami pertumbuhan sebesar 74,6231684. Kemudian terus mengalami pertumbuhan sampai pada tahun 1997 sebesar 1054,347358. Pada tahun 1998 GDP Indonesia 459,1918631 dan pada tahun tersebut Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan penurunan GDP perkapita sebesar 595,1554949. Kemudian pasca krisis, GDP perkapita Indonesia mulai membaik dan terus mengalami pertumbuhan seperti pada tahun 2018 menginjak angka 3902,661675.

Paska krisis, Indonesia dihadapkan pada tugas yang monumental untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya tahan sistem keuangan. Dengan tekad dan reformasi yang mendalam, Indonesia berhasil melalui masa-masa sulit tersebut. Pemerintah melaksanakan sejumlah reformasi struktural, termasuk perbaikan dalam kebijakan moneter, fiskal, dan perbankan. Transformasi ini menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

B. Kebijakan kuantitatif Indonesia: Kuantitas vs Harga

Pengertian Kebijakan Kuantitatif adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral, termasuk Bank Indonesia (BI), untuk memengaruhi kuantitas uang yang beredar di pasar keuangan. Dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia, terdapat perbedaan antara fokus pada kuantitas uang (jumlah uang yang beredar) dan fokus pada harga (suku bunga) dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan kuantitatif.

Dikutip dari laman Sumber Belajar Kemdikbud, kebijakan moneter adalah dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Langkah penawaran uang yang ditambah akan menurunkan suku bunga dan akibatnya terjadi

perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran pun akan berkurang. Selain penawaran uang yang perlu ditambah, pengeluaran agregat perlu dikurangi sehingga terdapat keseimbangan antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen berikut:

a. Operasi pasar terbuka

Operasi pasar terbuka (OPT) adalah salah satu cara mengendalikan uang yang beredar yang dilakukan oleh pemerintah. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual (open market selling) atau membeli (open market buying) surat-surat berharga milik pemerintah.

b. Fasilitas Diskonto (discount rate)

Fasilitas Diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank sentral. Sebaliknya ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang beredar.

c. Rasio cadangan wajib

Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan.

Pendekatan berbasis kuantitas dan pendekatan berbasis harga merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam merancang kebijakan ekonomi, terutama dalam konteks kebijakan kuantitatif di Indonesia.

a. Pendekatan Berbasis Kuantitas

Pendekatan ini fokus pada kontrol atau pengaturan jumlah barang atau layanan yang diproduksi atau dikonsumsi. Contohnya adalah kebijakan kuantitatif yang mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian, seperti kebijakan moneter yang menetapkan target jumlah uang yang tersedia di pasar. Di Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan moneter, termasuk mengatur tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar.

b. Pendekatan Berbasis Harga

Pendekatan ini lebih fokus pada pengaturan harga barang atau layanan, dengan tujuan mengendalikan inflasi atau deflasi. Contohnya adalah kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah untuk barang-barang pokok atau bahan bakar, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. Dalam konteks Indonesia, pemerintah seringkali menerapkan subsidi harga untuk barang-barang tertentu guna menjaga daya beli masyarakat atau mengendalikan biaya hidup.

c. Kebijakan Kuantitatif dan Harga di Indonesia

Dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia, terdapat perubahan pendekatan dari kuantitas menjadi harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan transisi dari pendekatan kuantitas pada tahun 2000-2004 menuju pendekatan harga mulai tahun 2004 hingga saat ini. Pendekatan kuantitas melibatkan variabel seperti suku bunga SBI, uang primer (M0), uang beredar (M1), dan inflasi. Sementara itu, pendekatan harga melibatkan variabel seperti suku bunga SBI, suku bunga PUAB, suku bunga deposito 12 bulan bank umum, suku bunga kredit, dan inflasi.

Menurut hasil penelitian yang diteliti oleh Mohamad Yusuf dengan judul "Efektivitas Jalur-Jalur Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Dengan Sasaran Tunggal Inflasi" pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan hasil pengujian, jalur kuantitas uang (moneter) di Indonesia pada periode penelitian dinilai tidak cukup efektif. Hal ini disebabkan bahwa perekonomian Indonesia telah berubah dengan cepat dan semakin terbuka sehingga hubungan dengan negara lain semakin terintegrasi. Selain itu, sektor keuangan berkembang sangat cepat ke arah bekerjanya mekanisme pasar, timbulnya inovasi produk-produk keuangan baru, serta membaurnya operasi bank dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Hal-hal tersebut telah menyebabkan proses penciptaan uang lebih banyak terjadi di luar kendali otoritas moneter dan proses money multiplier tidak lagi dapat diprediksi dengan baik, sehingga paradigma lama sistem pengendalian moneter dengan sasaran kuantitas tersebut menjadi semakin kurang relevan. Jalur suku bunga (interest rate channel) menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil.

Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan mempengaruhi perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output riil. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter pada jalur nilai tukar kurang efektif dibandingkan dengan jalur suku bunga. Hasil studi ini berbeda dengan kondisi yang disyaratkan dalam teori purchasing power parity bahwa gejolak nilai tukar berpengaruh terhadap variabilitas harga barang-barang yang diperdagangkan (tradeable) yang selanjutnya berpengaruh terhadap variabilitas inflasi, tidak relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia dalam periode studi ini. Hal ini terjadi karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi misalnya faktor sentimen pasar dan gejolak politik.

C. Kebijakan Nilai Tukar Dan Devisa

Pengertian Nilai Tukar adalah mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar merupakan salah satu variabel yang penting dalam suatu perekonomian terbuka, sebab variabel tersebut berpengaruh pada variabel lain antara lain harga, tingkat bunga, neraca pembayaran, serta transaksi berjalan.

Kurs nilai tukar merupakan harga atau nilai mata uang negara-negara lain yang dinyatakan dalam nilai mata uang domestik. Kurs valuta asing juga dapat diartikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yakni banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai tukar ditentukan dari banyaknya permintaan dan penawaran di pasar atas mata uang tersebut.

1) Sistem Kebijakan Nilai Tukar

Sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sebelum menetapkan sistem nilai tukar yang akan diberlakukan, pemerintah mendapat masukan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia mengajukan usulan tentang sistem nilai tukar yang akan diberlakukan setelah melakukan kajian tentang situasi dan kondisi perekonomian nasional dan internasional secara menyeluruh. Setelah pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang akan digunakan, pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar. Kewenangan yang dimiliki oleh otoritas moneter dalam melaksanakan sistem nilai tukar antara lain adalah sebagai berikut: dalam sistem nilai tukar tetap otoritas

moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan devaluasi atau revaluasi mata uang domestik terhadap mata uang asing, dalam sistem nilai tukar mengambang otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi pasar dalam mengendalikan nilai mata uang domestik, dalam nilai tukar mengambang terkendali otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. Terdapat tiga system nilai tukar yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai system nilai tukar yang berlaku, yaitu :

a) Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate)

Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar dimana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara (Central Bank) menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas.

Kurs devisa tetap standar kertas pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dan berusaha mempertahankannya dengan berbagai macam kebijaksanaan. Jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami masalah, misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi, maka pemerintah bisa intervensi ke pasar dengan membeli atau menjual kurs mata uang yang berada dalam devisa negara tersebut untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs tetapnya. Dalam kurs tetap ini, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas dalam penetapan nilai tukar. Nilai tukar mungkin masih bergerak, namun dalam rentang (spread/bandwidth) yang sangat sempit. Apabila terjadi fluktuasi besar hingga pemerintah merasa telah melenceng jauh dari nilai keekonomian yang seharusnya dan dianggap dapat mengganggu kinerja perekonomian negara, maka pemerintah dapat melakukan kebijakan devaluasi atau pelemahan mata uang domestik secara sengaja terhadap mata uang asing.

Keunggulan dari sistem kurs tetap adalah : kegiatan spekulasi mata uang sangat sempit, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil, pemerintah peranan penuh dalam control devisa dan kepastian nilai tukar kedepan. Sedangkan kelemahannya adalah cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valas, kurang fleksibel terhadap perubahan global, penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor negara bersangkutan.

b) Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate)

Kurs ini bergerak dalam rentang pasar (spread atau bandwidth) tertentu dimana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Dengan kata lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada aktivitas pasar valas. Dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Jadi dalam sistem ini, pergerakan nilai tukar tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang saja. Kurs mengambang terkendali disebut juga dengan kurs distabilkan. Kurs bebas seperti yang telah disebutkan di atas sering menimbulkan ketidaktentuan kurs valuta asing, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar.

Pada dasarnya dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga bebas bergerak naik maupun turun. Namun supaya tidak terjadi gejolak yang terlalu dahsyat, yang kriterianya ditentukan oleh Bank Sentral, pemerintah dapat campur tangan sampai batas-batas tertentu. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dapat berupa: Mengambang bersih, yaitu terjadi jika campur tangan pemerintah tidak langsung, yaitu dengan pengaturan tingkat bunga. Dan mengambang kotor yang terjadi jika campur tangan pemerintah secara langsung, yaitu dengan menjual atau membeli valuta asing.

Keunggulan sistem kurs mengambang terkendali antara lain mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel, adanya aktifitas demand dan supply dalam pasar valas akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi, mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Sedangkan kelemahannya antara lain devisa tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu, ada persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulasi dalam memprediksi dan menetapkan kurs, dan tidak selamanya mampu mengatasi norisadari pembayaran atau perdagangan

c) Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Rate)

Kurs mengambang bebas merupakan suatu system ekonomi yang lebih cocok ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Sistem nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi ekuilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara bersangkutan. Jadi dalam sistem nilai tukar ini seharusnya tidak ada campur tangan pemerintah.

Keunggulan sistem kurs mengambang bebas antara lain: cadangan devisa lebih aman, persaingan pasar ekspor-impor sesuai dengan mekanisme pasar, kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir, tidak ada batasan valas, dan terciptanya ekuilibrium pasar valas. Sedangkan kelemahannya antara lain praktik spekulasi semakin bebas, kurang tepat untuk negara berkembang karena berpotensi depresiasi yang fluktuatif.

2) Pengertian Devisa

Dalam perdagangan internasional membutuhkan kesepakatan alat pembayaran yang berlaku secara internasional, salah satunya adalah devisa. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin atau sudah melakukan perdagangan internasional sudah semestinya memiliki devisa. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dikatakan bahwa devisa adalah salah satu alat dan sumber pembiayaan bagi bangsa dan negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Jadi, Devisa adalah semua aset dalam bentuk uang maupun instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, yang dimiliki oleh pemerintah, bank sentral, dan masyarakat umum di suatu negara.

3) Sistem Kebijakan Devisa

Kebijakan devisa Indonesia diarahkan untuk memelihara kondisi perekonomian yang sehat dan handal, serta mendorong ekspor dan pengendalian impor, mendukung kestabilan pasar dan kurs valuta asing. Kebijakan cadangan devisa yang dianut Indonesia adalah sistem devisa bebas, dengan perkataan lain tidak ada batasan mengenai jumlah uang yang boleh dibawa masuk dan keluar Indonesia. Sistem ini juga menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Indonesia (Subandi, 2008). Selain itu, cadangan devisa dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu jaminan bagi tercapainya stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara.

KESIMPULAN

Sebelum krisis moneter Asia pada tahun 1997, Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang cenderung longgar. Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada menjaga stabilitas harga. Hal ini tercermin dalam tingkat suku bunga yang relatif rendah dan kebijakan kredit yang longgar. Namun, akibat dari kebijakan tersebut, terjadi overheating ekonomi yang menyebabkan defisit transaksi berjalan yang tinggi. Saat krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Bank Indonesia terpaksa mengubah

kebijakan moneternya secara drastis untuk mengatasi gejolak ekonomi yang terjadi. Upaya stabilisasi mata uang rupiah dilakukan melalui intervensi pasar valuta asing dan peningkatan suku bunga acuan secara signifikan. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak mampu menghentikan pelemahan nilai tukar rupiah. Setelah krisis 1997, Indonesia melakukan reformasi sistem keuangan dan moneter untuk memperbaiki ketahanan ekonominya. Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan inflasi targeting dengan fokus utama pada stabilitas harga. Selain itu, transparansi kebijakan moneter juga ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap mata uang rupiah.

Indonesia juga pernah menerapkan kebijakan kuantitatif sebagai bagian dari instrumen kebijakan moneter. Kebijakan kuantitatif ini mencakup pembelian aset oleh bank sentral untuk menstabilkan pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas dalam sistem perbankan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar valuta asing jika diperlukan. Selain itu, cadangan devisa yang cukup besar juga menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga ketahanan eksternal negara.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak krisis moneter 1997. Dari fokus pertumbuhan ekonomi menuju stabilitas harga dan ketahanan ekonomi yang lebih baik melalui berbagai instrumen kebijakan seperti kuantitatif dan pengaturan nilai tukar serta devisa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Tri Utami, Daryono Soebagiyo, Penentu Inflasi Di Indonesia; Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, Ataukah Cadangan Devisa, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2013
- Awibi Nazhicul Amin.,dkk,2023 *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter (Periode 1978-2018)*,Tulungagung
- Awibi Nazhicul Amin.,dkk,2023*PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS MONETER (PERIODE 1978-2018)*,Tulungagung
- Eka Budiyanti, Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, 2014
- Fadhilah Insani, Ika Darma Y, Isnaini H, Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi (Peran Bank Sentral), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2023
- Herania, E. & Maski, G.Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Jalur Periode 2010Q1 –2020Q4. *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking*. Vol. 01, No. 2, 2022
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Masri, Zainal Arifin H., and Syamsul Hadi. "Nilai Tukar dan Kedaulatan Rupiah." *Sosio e-Kons* 8.1 (2016).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jaya, 2004
- Mohamad Yusuf, Efektivitas Jalur-Jalur Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Dengan Sasaran Tunggal Inflasi, *Indonesian Treasury Review* Vol. 1 No. 1, 2016
- Perry Warjiyo, Solikin , *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017
- Seno Sudarmono Hadi, *Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global*, *Jurnal Moneter*, Vol. 4, No. 1, April 2017
- Simorangkir, Iskandar. "Sistem dan kebijakan nilai tukar." *Seri Kebanksentralan* 12 (2004).Jumlah referensi yang digunakan